

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENGALIHAN
HUTANG YANG DILAKUKAN KREDITUR TANPA
SEPENGETAHUAN DEBITUR**
**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2077 K/Pdt/2002)**

SERIKAT SEMBIRING*
Dr.IBNU AFFAN,SH.,M.Hum**
Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum***

ABSTRAK

Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan Perbankan.

Permasalahannya adalah peralihan hutang yang dibenarkan dalam KUHPerdata, akibat hukum setelah terjadinya peralihan hutang atas sebuah perjanjian kredit serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2077 k/Pdt/2002

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Aturan peralihan hutang yang dibenarkan dalam KUHPerdata terdapat dalam Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mengatur mengenai cara penyerahan suatu piutang atas nama. Cara untuk melakukan penyerahan piutang atas nama dikenal dengan nama cessie. Piutang yang dapat diserahkan dan/atau dialihkan dengan cara cessie hanyalah piutang atas nama kreditur. Akibat hukum setelah terjadinya peralihan hutang berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya ditangan siapapun berada, Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2077 k/Pdt/2022 setelah meneliti memori kasasi serta kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum.

Kata Kunci : Pengalihan Hutang, Kreditur, Debitur.

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

*** Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**UNLAWFUL ACTIONS FOR ACTIONS OF DEBT TRANSFER
PERFORMED WITHOUT CREDITORS
DEBTOR'S KNOWLEDGE**
**(Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 2077 K/Pdt/2002)**

SERIKAT SEMBIRING^{*}
Dr.IBNU AFFAN,SH.,M.Hum^{}**
Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum^{*}**

ABSTRACT

Credit in banking activities is the most important business activity, because the largest income from the Bank's business comes from income from credit business activities, namely in the form of interest and fees. The scope of credit as a banking activity.

The problem is the transfer of debt which is justified in the Civil Code, the legal consequences after the transfer of debt on a credit agreement and the judge's consideration in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2077 k/Pdt/2002

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing the science of law with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which then the data will be analyzed in a juridical manner.

It is concluded that the rules for transferring debts that are justified in the Civil Code are contained in the provisions of Article 613 of the Civil Code governing how to submit a receivable on behalf of. The method for submitting receivables on behalf of is known as a cessie. Receivables that can be submitted and/or transferred by cessie are only receivables on behalf of creditors. Legal consequences after the transfer of debt based on material rights attached to the Fiduciary Guarantee and the principle of droit de suite where the right continues to follow the object in the hands of whoever is in the hands of the judge in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 2077 k/Pdt/2022 after examining the cassation memory and counter the cassation memory is related to the consideration of the DKI Jakarta High Court which corrected the decision of the Central Jakarta District Court not to apply the law wrongly.

Keywords: Transfer of Debt, Creditors, Debtors.

^{*} Students of the Master of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{**} Advisor I Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{***} Advisor I Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra